



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Senayan: sebaiknya melalui senat kampus  
Tanggal : Kamis, 17 November 2022  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 7

Rektor UIN Jakarta Kok Dipilih Menteri Agama

# Senayan: Sebaiknya Melalui Senat Kampus

Pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta periode 2023-2027 menuai polemik. Pasalnya, rektor dipilih secara langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

ANEHNYA lagi, seleksi calon rektornya yang seluruhnya berasal dari Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) akan diadakan di Surabaya, Jawa Timur, bukan di Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta, atau di UIN Jakarta itu sendiri. Hal itu disuarakan pengajar UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani melalui akun twiternya @saiful\_muzani, Minggu (13/11).

Menanggapi cuitan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily juga menolak cara pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag). Sebab, rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik.

"Mekanisme serupa pernah dipertanyakan semasa Menag Lukman Hakim Saifudin masih menjabat pada 2014," ujar Ace dalam keterangannya, kemarin.

Ace menjelaskan, sistem pemilihan rektor untuk perguruan tinggi di bawah lingkungan Kemenag, yaitu UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015. Isinya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Sistem pemilihan itu pernah ditanyakan Ace dalam rapat kerja (raker) dengan Menag era Lukman Hakim Saifudin. "Saya menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," tegas politikus Golkar itu.

Dia merasa heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Mengapa proses wawancara itu tidak dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kemenag yang berlokasi di Jakarta.

"Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta? Atau di Kantor Kemenag di Jakarta?" tanya Ace.

Ketua Umum Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Jakarta ini me-



Ace Hasan Syadzily

negaskan, lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.

Ace mengusulkan agar proses pemilihan Rektor UIN Jakarta atau UIN lainnya yang telah memiliki kualifikasi unggul dikembalikan ke semua. Yaitu, proses pemilihannya dilakukan oleh stakeholder kampus bersama dengan Kemenag. Seperti halnya perguruan tinggi di bawah koor-

dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, pemilihan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Menag bertujuan untuk meminimalisir politisasi di kampus. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi politisasi dalam pemilihan rektor. Bahkan, tidak jarang hal itu memunculkan lubang perpecahan.

Padahal, kampus adalah lembaga akademik, bukan lembaga politik. "Saya melihat PMA 68/2015 dalam semangat mengembalikan kampus sebagai civitas akademika, bukan civitas politika," kata Ramdhani dalam keterangan persnya, kemarin.

Dia menjelaskan, pemilihan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dilakukan melalui tiga tahapan yang melibatkan kampus dan Menag. Tahap pertama adalah penilaian administrasi dan kualitatif. Tahap ini dilaksanakan oleh senat PTK. Hasil dari proses yang berlangsung di senat, kemudian dikirim ke Kemenag.

"Jadi pelibatan senat justru dilakukan sejak awal. Senatlah yang memberikan penilaian awal

tentang kelayakan para calon rektor," jelasnya.

Tahap kedua adalah *fit and proper test*. Tahap ini dilakukan Komisi seleksi (Komsel) untuk menetapkan para calon yang sebelumnya diseleksi senat PTK dan ditetapkan masuk tiga besar. Selanjutnya, hasil fit and proper test dari Komsel ini selanjutnya disampaikan ke Menag.

Komsel beranggotakan tujuh orang yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman menjadi pimpinan perguruan tinggi. Ada juga unsur birokrasi Kemenag. Anggota Komsel rata-rata berasal dari kampus, dan seluruhnya adalah Guru Besar.

"Jadi Komsel tentu bukan orang sembarangan. Mereka diberi tanggung jawab untuk memilih tiga orang dari calon yang sebelumnya diseleksi Senat PTK," kata Dhani.

Terakhir, Menag akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan Komsel. Dengan fakta tersebut, PMA 68 tahun 2015 memperbolehkan Menag pada ujung proses. Sebab, seleksi awal dilakukan Senat PTK, lalu diuji Komsel, baru pada akhir proses, Menag diberi kewenangan menetapkan satu dari tiga pilihan Komsel. ■TIF